

Portraits of Women in the New Order Era

Potret Perempuan Masa Orde Baru

Riva Azizah^{1*}

¹Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(*) Corresponding Author

rivaazizah2003@gmail.com

Received: 11 Februari 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Keywords:

Women; New Order; New Order Era

Abstract

Women have an important role in the process of forming a new civilization, because it is from women that the new generation receives education. It is not surprising that the lack of progress of women influences whether or not a nation develops or progresses. In Indonesian history, women have had their own dynamics in their historical role; women's participation in all aspects of national and state life cannot be ignored. Even though the majority of women in Indonesia are under patriarchal domination, in line with the demands of the times and the real conditions of the surrounding environment, women are also required to play an active role in the public sector. This research uses a qualitative approach with document analysis methods as a data collection instrument.

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki dinamika tersendiri dalam perannya sepanjang sejarah Indonesia, dan partisipasinya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski mayoritas perempuan di Indonesia menghadapi penindasan patriarki, namun untuk memenuhi tuntutan zaman dan realitas di sekitarnya, perempuan juga harus berperan aktif di sektor publik. Perempuan merupakan peranan penting dalam proses penciptaan peradaban baru, karena dari perempuanlah generasi penerus mewarisi pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika rendahnya kemajuan perempuan mempengaruhi perkembangan atau kemajuan suatu negara.

Perjuangan perempuan pada awal abad ke-20 mulai mengarah pada kemajuan menuju kebebasan yang setara dengan laki-laki. Hal ini berawal dari terwujudnya gagasan yang ditulis oleh Kartini tentang kesadaran pendidikan bagi perempuan, yang didasari oleh kenyataan bahwa pendidikan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan dan perubahan karena perempuan generasi awal penerus bangsa mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para tokoh perempuan terpelajar di Indonesia mulai memperjuangkan pendidikan perempuan. Seiring dengan berkembangnya pendidikan perempuan berdampak pada perluasan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat hingga terjadinya revolusi fisik (1945-1950), dimana gerakan perempuan Indonesia dipandang sangat progresif dalam upaya pendirian negara Indonesia. Banyak organisasi perempuan yang muncul dan berkembang di Indonesia, dan meskipun perempuan berperan aktif dalam politik peran mereka sebagai ibu dan istri di rumah tidak terabaikan. Gerakan yang dilakukan perempuan saat itu melampaui cita-cita Kartini yang tertulis dalam surat-suratnya.

Indonesia memasuki era Orde Baru antara tahun 1966 dan 1998, menggantikan rezim sebelumnya, Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Suharto memimpin era Orde Baru selama 32 tahun, menjadi presiden terlama di Indonesia, hingga ia dipaksa mundur oleh rakyat pada tahun 1998. Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari dominasi negara dalam segala bentuk. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi wanita dalam orde baru, sehingga peneliti mengambil tema potret perempuan masa orde baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen sebagai instrumen utama pengumpulan data. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi jurnal, berita, arsip pemerintah, surat kabar, majalah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan sejarah perempuan masa orde baru. Selain itu, analisis isi juga dilakukan terhadap teks-teks seperti pidato, manifesto, dan artikel yang membahas tentang perempuan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, diharapkan dapat mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul terkait sejarah perempuan masa orde baru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali secara mendalam makna dan konteks tentang sejarah perempuan di masa orde baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tiga pertanyaan penelitian yakni: 1) apa saja kebijakan dan ideologi pemberdayaan perempuan; 2) bagaimana perempuan dan politik Indonesia masa orde baru; 3) akses pendidikan perempuan masa orde baru.

Kebijakan dan Ideologi Pemberdayaan Perempuan

Negara berperan besar dalam menciptakan tatanan dalam kehidupan warga negaranya. Negara mengatur kehidupan warganya melalui kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada perubahan kehidupan mereka. Berhasil tidaknya suatu negara ditentukan oleh keputusan negara tersebut dalam mengeluarkan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan rakyatnya atau untuk kepentingan segelintir kelompok.

Tahun 1968 hingga tahun 1983 merupakan masa paling penting dalam mengubah kehidupan perempuan di Indonesia, masa transisi yang sangat menentukan keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam menata tubuh dan gerak perempuan melalui implementasi kebijakan PKK dan KB di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menganut ideologi pembangunan yang menekankan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pemerintah mendorong perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan pekerjaan melalui berbagai program, namun mereka masih terbatas pada peran tradisional sebagai istri dan ibu.

Organisasi dan sejarah perempuan mengalami banyak lika liku pada masa Orde Baru. Politik Orde Baru menggunakan kekuasaannya untuk memutarbalikkan sejarah, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyerupai komunisme adalah tidak beradab atau jahat. Dalam upaya mewujudkan negara bebas komunisme, seluruh organisasi yang terkait dengan komunis, termasuk organisasi perempuan Gerwani, dihancurkan. Setelah Gerwani dibubarkan, pemerintah menunjuk Kowani (Kongres Perempuan Indonesia) sebagai organisasi pelindung seluruh kelompok perempuan.

Ditunjuknya Kowani sebagai organisasi seluruh kelompok perempuan tidak membawa kabar baik atau angin segar bagi perempuan Indonesia, justru sebaliknya. Kowani mendapat ketetapan resmi dari pemerintah dalam Panca Dharma Wanita, yang meliputi: 1) perempuan sebagai pasangan setia suami, 2) perempuan sebagai pembentuk generasi penerus bangsa, 3) perempuan sebagai pendidik dan pembimbing anak, 4) perempuan sebagai pengurus rumah tangga, dan 5) perempuan sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Dengan adanya Panca Dharma Wanita, hal tersebut sangat membatasi perempuan. Pada masa Orde Baru, perempuan sebagian besar dikucilkan dari ruang publik dan dibatasi hanya pada tugas-tugas rumah tangga.

Organisasi Dharma Wanita dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) juga didirikan untuk memberdayakan perempuan, namun mereka sering kali berfungsi untuk mendukung stabilitas politik dan sosial yang diinginkan rezim. Hal ini menciptakan sebuah paradoks dimana perempuan diberdayakan namun tetap diharapkan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga.

Implementasi kebijakan perempuan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan di Indonesia. Perempuan tidak lagi bebas mengaktualisasikan dirinya sesuai keinginannya dimana semua telah diatur oleh negara, termasuk hak-hak pribadinya sebagai perempuan.

Perempuan Dan Politik Indonesia

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, perempuan sudah memainkan peran dalam dunia politik. Gayatri Rajapatni (Ratu Para Ratu), yang meninggal pada tahun 1350, tercatat dalam sejarah Indonesia dianggap sebagai orang yang berjasa atas keberhasilan Kerajaan Majapahit. Peran politik Gayatri melahirkan generasi politik yang luar biasa di Nusantara kala itu. Sejarah menyoroti sejumlah fakta bagaimana peran perempuan telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu profesionalisme didasarkan pada kemampuan individu, tidak ada kaitannya dengan gender.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan masih rendah dalam struktur partai politik dan lembaga legislatif. Banyak faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik praktis. Kerap kali relasi politik formal dianggap sebagai dominasi politik maskulin terhadap politik feminisme. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam politik. Hal tersebut mendukung anggapan bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan keterwakilan politik formal dianggap tabu. Partisipasi politik perempuan seringkali dipandang pasif pada pemilu dan ajang politik lainnya.

Menurut Nurland di dalam W Jati, terdapat tiga poin penting mengenai terbatasnya perempuan dalam ranah politik formal yaitu: 1) Perempuan Indonesia menghadapi budaya patriarki yang berdampak signifikan pada

kehidupan sehari-hari mereka. Perempuan seringkali dipandang sebagai subordinat laki-laki yang mempunyai peran utama dalam masyarakat. Budaya patriarki bertujuan untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Laki-laki cenderung menjadi “something”, sedangkan perempuan menjadi “nothing” sehingga memunculkan pola dominasi laki-laki terhadap perempuan. Rancangan tersebut menyatakan bahwa perempuan “bukan apa-apa” tanpa peran laki-laki. Terdapat upaya untuk menundukkan perempuan dengan memaksakan norma, perilaku, dan nilai-nilai maskulinitas. Perempuan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab antara rumah tangga dan karier, yang menjadikan perempuan tidak bisa sepenuhnya bebas menjadi entitas mandiri. 2) Doktrin agama yang masih konservatif dinilai terlalu membatasi kebebasan perempuan di ruang publik. Ajaran agama Indonesia mempunyai kekuatan teologis untuk melemahkan posisi inferioritas perempuan. Dengan adanya anggapan laki-laki adalah imam bagi perempuan, doktrin agama yang konservatif membatasi ruang gerak perempuan, dan laki-laki sering kali menjadi pionirnya. 3) Hegemoni negara masih dipersepsikan sebagai negara yang didominasi laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab mengurus dan memeriksa suatu hal, sedangkan perempuan bertugas sebagai asisten. Adanya pandangan tersebut sebenarnya ingin memberikan penegasan bahwa urusan negara sebagai urusan vital yang perlu diserahkan kepada kaum lelaki sebagai administrator dan eksaminator dan perempuan hanya menjadi asisten saja. Sebenarnya negara adalah ruang netral yang memberikan kesetaraan bagi siapa pun baik itu pria maupun wanita untuk bisa berkecimpung secara bersama dalam mengelola negara. Pada Orde Baru kiprah perempuan untuk turut berperan aktif dalam aspek kehidupan termasuk politik terbuka lebar. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya.

Partisipasi perempuan dalam politik semakin positif. 8 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan sejak periode orde baru hingga reformasi. Perempuan lebih cenderung merasa nyaman dalam politik karena kebijakan yang berpihak pada perempuan. Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan masih belum mampu mengentaskan kaumnya dari kesetaraan gender yang telah dialami. Oleh karenanya, diperlukan daya juang yang tinggi bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang tidak dapat dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, melainkan dibutuhkan kerjasama dengan entitas sosial lainnya.

Dapat dikatakan secara umum baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, sejarah mencatat bukti adanya kemajuan yang dialami perempuan. 9 Seperti halnya laki-laki, perempuan merupakan warga negara yang melekat pada dirinya kewarganegaraan yang sama kedudukannya. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi dikarenakan perbedaan jenis kelamin / gender, seperti halnya tidak dibenarkan adanya deskriminasi karena perbedaan agama, ras, bahasa, suku dan lain sebagainya dikarenakan hal tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Perlu adanya revitalisasi perjuangan kesetaraan gender. Perjuangan tersebut harus diletakkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas, dengan membebaskan manusia dari segala bentuk deskriminasi baik atas dasar jenis kelamin, suku, ras maupun agama. Sehingga ketimpangan gender dapat teratasi, karena majunya perempuan akan berimplikasi pada kemajuan rakyat Indonesia.

Akses pendidikan Perempuan

Perkembangan pendidikan Indonesia setelah tahun 1965 atau pada masa Orde Baru hingga tahun 1998 runtuhnya Orde Baru disebut sebagai masa pembangunan nasional, dengan adanya instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Saat masa ini, sistem pendidikan sejalan dengan kebijakan sosial dan politik, seperti sentralistik, depolitisasi, penguatan pemerintahan, dan kurangnya keseriusan. 10 Meskipun undang-undang dan lembaga pendidikan membentuk kebijakan pendidikan, hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Pendidikan Indonesia pada tahun 1965 hingga 1975 berfokus pada pembelajaran, dipandang sebagai upaya siswa untuk berkembang dari tidak tahu menjadi tahu dan mampu menjadi, bukan mencipta.

Salah satu pencapaian signifikan Orde Baru adalah peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Program pendidikan yang diinisiasi pemerintah berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di sekolah. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan di daerah pedesaan, di mana tradisi dan adat istiadat seringkali menghalangi perempuan untuk menerima pendidikan yang setara. Tujuan pendidikan pada masa Orde Baru adalah sebagai alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Mahasiswa dibesarkan sebagai manusia “pekerja” yang kemudian menjadi instrumen penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan pada masa Orde Baru tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melainkan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, dengan fokus pada orientasi politik untuk memastikan seluruh masyarakat selalu

mengikuti segala arahan pemerintah. Ketika keputusan dewan bersifat adil dan tidak dapat dilanggar. Pendidikan dijalankan dibawah kekuasaan dan administrasi birokrasi pemerintah.

KESIMPULAN

Negara memiliki peranan besar terhadap pembentukan suatu tatanan dalam kehidupan rakyatnya. Melalui kebijakan, negara mengatur kehidupan rakyatnya, pengaruh kebijakan dapat terlihat dari adanya perubahan dalam kehidupan rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu negara terletak pada keputusan negara dalam mengeluarkan kebijakan, kebijakan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan rakyatnya atau hanya untuk kepentingan beberapa golongan.

Pada masa orde baru wanita mulai bermunculan dalam dunia politik dengan adanya kebijakan yang dibuat Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto yang menganut ideologi pembangunan yang menekankan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pemerintah mendorong perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan pekerjaan melalui berbagai program, tetapi mereka masih terbatas pada peran tradisional sebagai istri dan ibu. Namun, hal tersebut tidak menghalangi perempuan dalam berkembang dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir, 'Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa', Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2004, 283–94
- Dewi, Vitriyana Kusuma, and Gayung Kasuma, 'Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan PKK Dan KB Tahun 1968-1983)', Jurnal Kesejarahan, 4.2 (2014), pp. 157–72
- Ekawati, Esty, 'Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru', Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 16.1 (2018), p. 67, doi:10.14421/musawa.2017.161.67-80
- Jati, Wasisto Raharjo, 'Kebijakan, Praktik, Dan Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik', Paramita, 24.2 (2014), pp. 200–210
- Kusmawati, Heny, 'Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru', EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies, 2.9 (2023), pp.173–85
<https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/download/111/117>
- Nurchayyo, Abraham, 'Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Relevance of Patriarchal Culture to Women's Political Participation and Representation in Parliament)', Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 6.01 (2016), p. 25
- Nuri, Zalifa, and Susi Machdalena, 'Pembentukan Identitas Sosial Perempuan Pada Zaman Orde Baru', HUMANISMA: Journal of Gender Studies, 04.02 (2020), pp. 208–23
- Oktaviani, Jusmalia, and Teguh Puja Pramadya, 'Model Negara Kekuasaan: Orde Baru Dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes Dan Niccolo Machiavelli', Indonesian Perspective, 4.2 (2019), pp. 175–90, doi:10.14710/ip.v4i2.26701
- Xi, Volume, Nomor Januari, and Dosen lain Bone, 'Potret Perempuan Dalam Ranah Politik Di Indonesia', XI.September 2016 (2018), pp. 335–44